

ABSTRAK

HUBUNGAN PROGRAM LEGISLASI DAERAH DENGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN

Oleh

Indra Zakariya Rayusman

Pembangunan mendorong tujuan bernegara sebagaimana amanat konstitusi terwujud, untuk melaksanakan agenda pembangunan tersebut disusunlah tahapan dalam sistim perencanaan yang mengakomodir perkembangan atau dinamika masyarakatnya. Dalam penyusunan Prolegda Kab . didasarkan atas: a. perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi; b. rencana pembangunan daerah; c. penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan aspirasi masyarakat daerah. Perencanaan pembangunan disusun secara berjangka salah satunya meliputi: RPJM daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Permasalahan dalam tesis ini adalah bagaimana hubungan program legislasi daerah dengan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Way Kanan dan bagaimanakah produk hukum daerah untuk mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Way Kanan?

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan melalui pendekatan melalui studi kepustakaan dan pendekatan yuridis empiris yang dilakukan berdasarkan realitas atau studi kasus.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam proses pembentukan produk hukum daerah, Prolegda memiliki kedudukan yang sangat penting. Dengan berfungsinya Prolegda, maka pembentukan produk hukum daerah memiliki acuan yang memuat skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Daerah untuk jangka panjang, menengah atau jangka pendek. Penyusunan Prolegda tidak hanya untuk kepentingan pembentukan Perda semata, tapi lebih luas lagi terkait dengan keseluruhan program pembangunan daerah. Kabupaten Way Kanan sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 hingga saat ini belum mempunyai peraturan daerah terkait dengan Program Legislasi Daerah.

Pada akhirnya disarankan kepada Pemerintah Daerah bahwa Program Legislasi Daerah yang disusun hendaknya mencerminkan kerangka regulatif RPJMD dengan memperhatikan karakteristik dan aspirasi masyarakat.

Kata Kunci: Hubungan Legislasi Daerah, Perencanaan Pembangunan, Way Kanan